

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENGADAAN PUPUK NPK**  
**PRODUK DALAM NEGERI SECARA NASIONAL**  
**UNTUK KATALOG ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2023**

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk katalog elektronik sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik, perlu dibentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK Produk Dalam Negeri untuk Katalog Elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK Produk Dalam Negeri Secara Nasional Untuk Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENGADAAN PUPUK NPK PRODUK DALAM NEGERI SECARA NASIONAL UNTUK KATALOG ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK Produk Dalam Negeri Secara Nasional Untuk Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan pemilihan pada pelaksanaan Konsolidasi Pupuk NPK Produk Dalam Negeri;
  - b. melaksanakan pemilihan penyedia Pupuk NPK Produk Dalam Negeri dalam pelaksanaan konsolidasi;
  - c. membantu penyiapan finalisasi kontrak payung antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Prinsipal Produsen dan/atau Pelaku Usaha Produk Dalam Negeri;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan *E-purchasing* dari hasil konsolidasi Pupuk NPK Produk Dalam Negeri secara nasional untuk katalog elektronik; dan
  - e. menyampaikan laporan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait yang dibutuhkan, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2023  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
HUKUM DAN PENYELESAIAN  
SANGGAH LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PELAKSANA  
KONSOLIDASI PENGADAAN  
PUPUK NPK SECARA NASIONAL  
UNTUK KATALOG ELEKTRONIK  
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 MARET 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENGADAAN PUPUK NPK  
PRODUK DALAM NEGERI SECARA NASIONAL UNTUK KATALOG  
ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Unit Organisasi</b>
1	Pengarah	Setya Budi Arijanta	Kedeputusan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
2	Ketua	M. Aris Supriyanto	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
3	Anggota Tim Pokja Konsolidasi Pupuk NPK Produk Dalam Negeri	1. Sari Melani	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		2. Arif Budiman Anwar	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		3. Eko Rinaldo Oktavianus	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		4. Ade Rizky Emirsyah	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		5. Febrita Sidabalok	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
		6. Hilman Fazri	Direktorat Pasar Digital Pengadaan

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Unit Organisasi</b>
3	Anggota Tim Pokja Konsolidasi Pupuk NPK Produk Dalam Negeri	7. Intan Dana Lestari	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		8. Eva Sari Dewi	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		9. Nida Mufidah Anggraini	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
4	Anggota Tim Administrasi Konsolidasi Pupuk NPK Produk Dalam Negeri	1. Diana Ulfi Jannati	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		2. Andi Putri Fatania Nur Faisal	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		3. Aryandhika Sandya Nugraha	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		4. Niken Novia Sitaresmi	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		5. Fika Dautar Adika Putra	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA